



RELOKASI



MENGADU: Perwakilan pedagang TM2 didampingi dari LBH Jogja saat mengadukan proses relokasi ke Komnas HAM di Jakarta, Kamis (24/10).

Pedagang TM 2 Wadul ke Komnas HAM RI

JOGJA - Langkah para pedagang Teras Malioboro 2 (TM) 2 dalam memperjuangkan hak-haknya untuk dilibatkan dalam proses relokasi jilid dua, berlanjut ke pusat. Kamis (24/10) lalu, perwakilan pedagang mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di Jakarta ■
Baca Pedagang... Hal 7

ADUKAN KONDISI FAKTUAL PROSES RELOKASI

- Menurut para pedagang, Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja lalai dalam melindungi, menghormati, dan memajukan hak dari pedagang selaku rakyat terdampak kebijakan.
- Beberapa kendala yang dialami pedagang, di antaranya, pendapatan, tindakan represi dan intimidasi, serta pasifnya pemerintah yang dinilai menjadi manifestasinya.



ILUSTRASI: HIRPI KARTUN/RADAR JOGJA

Pedagang TM 2 Wadul ke Komnas HAM RI

Sambungan dari hal 1

Mereka mengadakan kondisi faktual yang terjadi dalam proses relokasi.

Staf Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja dan pendamping hukum PKL Malioboro Rakha Ramadhan mengatakan, hingga kini beberapa usulan yang ditujukan ke Komnas HAM belum terwujud. Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan, antara lain, akan menerbitkan surat perlindungan kepada para pedagang atas adanya represi dan dugaan kriminalisasi.

"Belum diterbitkan, masih dalam proses, kemarin bilang secepatnya," ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (27/10). Selain itu, Komnas HAM juga akan melakukan peninjauan atas laporan dari para pedagang. Selain itu, juga disampaikan akan melakukan upaya jeda dahulu proses relokasi untuk dikedepankannya musyawarah antara pedagang

dengan pemangku kebijakan.

Menurutnya, Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja lalai dalam melindungi, menghormati, dan memajukan hak dari pedagang selaku rakyat terdampak kebijakan. Beberapa kendala yang dialami pedagang, di antaranya, menurunnya pendapatan, tindakan represi dan intimidasi serta pasifnya pemerintah yang dinilai menjadi manifestasinya. "Kami telah sampaikan semuanya kepada Komnas HAM," tuturnya.

Menurut Rakha, Komnas HAM yang diwakili komisioner Hari Kurniawan menanggapi bahwa partisipasi masyarakat sangat perlu. Pemkot Jogja tidak boleh melakukan intimidasi dan memecah belah pedagang. Proses relokasi tanpa partisipasi melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Monggo Ngarso Dalem Sultan HB bertindak adil sebagai raja maupun sebagai kepala daerah," ujar

Raka menirukan pesan Hari Kurniawan.

Ketua Paguyuban Tri Dharma Supriyati menambahkan, PKL Malioboro sebagai rakyat kecil terhimpit di tengah dua kebijakan raksasa yakni Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Jogjakarta-Prambanan dan World Intangible Heritage UNESCO. Menurutnya, program itu berdampak pada penyingkiran hak-hak pedagang.

"Poin-poin ini menjadi latar belakang PKL Malioboro mengadu ke Komnas HAM dengan harapan Komnas HAM dapat menjadi institusi yang melindungi dan memajukan hak-hak dari para pedagang," bebarnya.

Perwakilan pedagang yang mendatangi Komnas HAM lima orang. Dua di antaranya dari LBH Jogja sebagai pendamping. Supriyati (ketua Paguyuban Tri Dharma) dan Arif Usman (ketua Koperasi Tri Dharma) juga turut hadir. (oso/laz/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005